



# Diduga Ada Penggelembungan Harga

## Polisi Endus Penyelewengan Anggaran Proyek Wifi Gratis di Sleman

**SLEMAN, TRIBUN** - Dugaan penyelewengan anggaran mewarnai proyek pengadaan langganan *wireless fidelity* (wifi) gratis tahun anggaran 2022-2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sleman. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut atas proyek wifi gratis bagi padukuhan, komunitas, dan pasar tradisional itu.

"Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dari pihak dinas, PPK, dan penerima manfaat juga sudah kita periksa. Penyedia jasa juga sudah dipanggil minggu kemarin, tapi minta dijadwalkan ulang minggu ini. Namun, belum hadir juga," kata Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, Rabu (12/3).

Polisi juga meminta keterangan penyedia jasa serupa sebagai data pembanding. Sebab, polisi menduga ada tindakan *markup* atau penggelembungan selisih harga jual dengan harga beli dalam pengadaannya. Namun demikian, Riski belum bisa berbicara detail mengenai modus yang terjadi. Polisi masih harus meminta audit investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

### DALAM PENYELIDIKAN

- Dugaan penyelewengan anggaran mewarnai proyek pengadaan langganan *wireless fidelity* (wifi) gratis tahun anggaran 2022-2023 di Kabupaten Sleman.
- Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman kini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut atas proyek wifi gratis bagi padukuhan, komunitas, dan pasar tradisional itu.
- Polisi menduga ada tindakan *markup* harga pengadaan dan telah memeriksa 10 saksi.

"Dalam waktu dekat, kalau penyedia jasa sudah datang (memberikan keterangan), akan kita ajukan AI atau audit investigasi ke BPKP untuk mengungkap penyimpangan, sekaligus menghitung potensi kerugian negara," katanya.

Pengadaan WiFi gratis ini merupakan proyek *multiyears* yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun. Biaya program ini menggunakan tahun anggaran 2022 senilai Rp3.203.200.000 dan Rp5.374.950.000 untuk 2023. WiFi gratis ini juga menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan di Kabupaten Sleman saat itu.

Riski mengungkapkan, penyelidikan sudah dimulai sejak akhir tahun 2024. Pihaknya juga sudah mengamankan beberapa dokumen proyek maupun buku register dinas. "Kami yakin akan naik ke penyidikan. Kalau

berbicara fakta hukum, maka menunggu hasil audit BPK dulu. Tapi, kami yakin (naik penyidikan) dari hasil pemeriksaan 10 orang itu. Nanti kalau naik sidik, pasti semua (saksi) akan dipanggil ulang. Juga, kami akan panggil ahli," ujar dia.

### Dukung proses hukum

Bupati Sleman Harda Kiswaya, saat dikonfirmasi terkait hal ini mengaku mendukung proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Sebab, dirinya menginginkan roda pemerintahan di Kabupaten Sleman bersih. Karena itu, apa yang dilakukan Polresta Sleman menjadi pembelajaran bersama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

"Saya sikapi seperti itu. Saya *support* dan siap membantu Polresta sleman untuk mengevaluasi perjalanan kami, utamanya di Diskominfo," ujar Harda. (rif)